LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juni 2025

JUDUL

"RPJMD Kabupaten Klungkung 2025–2029 Berbasis Kearifan Lokal: Membangun Klungkung dari Desa ke Pusat"

Fokus Strategis
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Tim Ahli
I Wayan Subamia, SE
Anggota Tim Pengendali Mutu

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan agenda strategis lima tahunan yang menjadi landasan utama bagi arah kebijakan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi instrumen untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam program dan kegiatan yang konkret dan terukur, serta menjadi rujukan perencanaan bagi seluruh perangkat daerah. Namun demikian, tantangan utama dalam penyusunan RPJMD sering kali terletak pada lemahnya keterhubungan antara dokumen perencanaan dengan realitas sosial, kultural, dan spasial daerah.

Kabupaten Klungkung memiliki karakteristik yang sangat khas dibandingkan kabupaten lainnya di Bali, yakni sebagai wilayah yang terdiri atas daratan dan kepulauan (Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan), serta memiliki warisan budaya dan kearifan lokal yang kuat. Dalam konteks ini, pendekatan perencanaan konvensional yang bersifat teknokratis sering kali tidak mampu mengakomodasi keragaman lokal dan dinamika kebutuhan masyarakat desa. Padahal, sebagian besar penduduk Klungkung masih menggantungkan hidup pada aktivitas berbasis komunitas, adat, dan sumber daya lokal.

Selama ini, perencanaan daerah masih cenderung bersifat top-down, di mana kebijakan dan prioritas pembangunan disusun dari pusat ke desa. Pendekatan ini kurang memberikan ruang bagi desa untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya secara utuh dalam perencanaan strategis lima tahunan. Padahal, desa-desa di Klungkung memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, serta penguatan identitas budaya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam penyusunan RPJMD

yang menjadikan desa sebagai titik awal orientasi pembangunan.

Dalam konteks pembangunan berbasis kearifan lokal, desa bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku utama dan sumber inspirasi kebijakan. Kearifan lokal Klungkung seperti sistem subak, banjar adat, desa pakraman, dan nilai-nilai kebersamaan perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam narasi dan strategi pembangunan daerah. Hal ini bertujuan agar RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan teknokratis, tetapi juga menjadi refleksi identitas, cita-cita, dan potensi masyarakat Klungkung itu sendiri.

Lebih jauh, RPJMD Kabupaten Klungkung 2025–2029 perlu disusun dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, mengedepankan prinsip partisipatif, kolaboratif, dan kontekstual. Dengan mendasarkan proses penyusunan pada kekuatan sosial-budaya dan dinamika desa, pemerintah daerah dapat membangun struktur perencanaan yang lebih adil, berakar, dan berdaya tahan terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, pembangunan Klungkung tidak hanya dimulai dari perkantoran pusat pemerintahan, tetapi justru dibangun dari denyut kehidupan masyarakat desa.

Inovasi kebijakan dalam penyusunan RPJMD ini diharapkan dapat menjadi pembeda antara RPJMD Klungkung dengan daerah lain, serta menunjukkan komitmen kuat kepala daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada nilai lokal dan kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini juga menjadi cerminan dari implementasi filosofi “dari desa membangun Klungkung,” bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara ideologis dan strategis.

Dengan semangat ini, maka penyusunan RPJMD 2025–2029 harus dirancang sebagai proses yang tidak hanya mengutamakan hasil akhir dokumen, tetapi juga kualitas prosesnya. Proses yang inklusif, transparan, dan dialogis akan menghasilkan dokumen RPJMD yang tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Hal ini menjadi pondasi penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan program pembangunan di masa mendatang.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Mengembangkan inovasi kebijakan dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Klungkung 2025–2029 yang berpijak pada kekuatan kearifan lokal, dengan menjadikan desa sebagai pusat orientasi perencanaan, guna mewujudkan pembangunan yang adil, kontekstual, dan berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menyusun dokumen RPJMD yang lebih berakar pada nilai dan praktik kearifan lokal Klungkung.
2. Menempatkan desa sebagai titik awal perencanaan pembangunan melalui pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up).
3. Meningkatkan partisipasi dan legitimasi masyarakat desa dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
4. Mendorong sinergi antara pemerintah daerah, desa adat, lembaga desa, dan komunitas lokal dalam menetapkan isu prioritas pembangunan.

5. Menyusun narasi pembangunan yang merepresentasikan identitas lokal dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat Klungkung.

II. Ide dan Gagasan

Kabupaten Klungkung mengusung model pembangunan desentralisasi spasial dan budaya, di mana desas sebagai pusat perencanaan dan penggerak kebijakan. Berdasarkan data BPS (tengah 2024), klungkung memiliki populasi sekitar 223.720 jiwa dengan 712 jiwa/km². Meski wilayah Nusa Penida terdiri dari 64% dari luas kabupaten, penduduknya baru mencapai sekitar 65.800 jiwa — menimbulkan tantangan distribusi layanan publik . Dengan data ini, gagasan ini menjadi semakin relevan untuk mengarahkan perencanaan yang memprioritaskan keadilan wilayah dan pemerataan pembangunan

A. Gambaran Potensi Daerah Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki karakter wilayah yang sangat khas karena terdiri dari dua zona geografis utama: Wilayah daratan: meliputi Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, dan Dawan. Wilayah kepulauan: meliputi Kecamatan Nusa Penida, yang mencakup tiga pulau besar: Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Wilayah Kabupaten Klungkung memiliki luas 315,00 km², di mana lebih dari 60% wilayahnya berada di kawasan kepulauan (Nusa Penida). Meski demikian, sebagian besar pusat administrasi dan ekonomi terkonsentrasi di wilayah daratan, sehingga menciptakan ketimpangan spasial dalam distribusi layanan dan pembangunan.

A.1 Potensi Demografi dan Kependudukan

Total jumlah penduduk Klungkung pada tahun 2023 mencapai 223.720 jiwa dengan rasio jenis kelamin 101,06 (BPS Klungkung, 2024). Sekitar 29,4% penduduk berada di Kecamatan Nusa Penida, sedangkan selebihnya tersebar di tiga kecamatan daratan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Klungkung mencapai lebih dari 1.700 jiwa/km², jauh lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Nusa Penida yang hanya sekitar 290 jiwa/km².

Pokok-pokok penting:

- Konsentrasi penduduk dan layanan publik masih berat sebelah di daratan.
- Potensi pertumbuhan penduduk di Nusa Penida masih terbuka luas jika didukung oleh peningkatan infrastruktur dasar.

A.2 Potensi Sosial Budaya dan Modal Sosial Lokal

Kabupaten Klungkung memiliki identitas budaya yang sangat kuat dan berperan besar dalam ekosistem kebudayaan Bali. Pusat kekuasaan kerajaan Bali terakhir, yaitu Kerajaan Klungkung, meninggalkan warisan budaya seperti Kerta Gosa, Puri Semarapura, dan lukisan tradisional Kamasan. Terdapat lebih dari 190 desa adat, subak aktif, dan komunitas seni tradisional yang tersebar hingga desa-desa pesisir di Nusa Penida. Tradisi gotong royong (ngayah) dan sistem sosial berbasis banjar masih berjalan aktif dan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang efektif.

Pokok-pokok penting:

- Modal sosial sangat tinggi untuk mendorong program berbasis komunitas.
- Nilai-nilai adat dan kearifan lokal bisa menjadi dasar arah pembangunan.

A.3 Potensi Ekonomi Lokal dan Mata

Pencaharian

Sumber penghidupan utama masyarakat Klungkung berasal dari sektor: Pertanian dan Subak di daratan (padi, hortikultura, palawija), dengan luas panen padi sawah tahun 2023 sekitar 2.308 ha. Perikanan tangkap dan budidaya laut (rumput laut) di Nusa Penida, terutama Desa Lembongan dan Suana. Produksi rumput laut meningkat dari 7.000 ton (2021) menjadi 10.800 ton (2023) (BPS Nusa Penida). Kerajinan rakyat dan industri kecil, seperti lukisan Kamasan, anyaman bambu, dan tenun tradisional yang menjadi unggulan ekspor domestik.

Pokok-pokok penting:

- Ekonomi berbasis sumber daya lokal masih dominan.
- Potensi UMKM dan ekonomi kreatif sangat besar jika ditata dan dipromosikan secara sistematis.

A.4 Potensi Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya

Salah satu kekuatan utama Klungkung adalah sektor pariwisata bahari dan budaya yang berkembang sangat pesat, terutama di wilayah kepulauan. Nusa Penida dikenal secara internasional karena destinasi pantai-pantai eksotis (Kelingking, Crystal Bay, Diamond Beach). Jumlah kunjungan wisatawan ke Nusa Penida pada tahun 2023 tercatat mencapai 778.000 wisatawan, yang didominasi oleh wisatawan mancanegara (>65%). Klungkung juga memiliki 16 desa wisata aktif, 5 di antaranya berada di Nusa Penida, dengan potensi integrasi wisata alam dan budaya lokal.

Pokok-pokok penting:

- Pariwisata adalah sektor pendorong utama PDRB (kontribusi >24%).
- Diperlukan manajemen daya dukung dan pelibatan desa dalam tata kelola wisata.

A.5 Potensi Wilayah Pesisir dan Ekologi

Kabupaten Klungkung memiliki garis pantai sepanjang 90 km lebih, sebagian besar berada di Nusa Penida. Potensi pesisir meliputi: Ekosistem terumbu karang dan padang lamun yang sangat kaya. Lokasi konservasi satwa laut seperti manta ray dan penyu. Kawasan rawan abrasi, kekeringan, dan overdevelopment yang perlu dikendalikan.

Pokok-pokok penting:

- Peluang untuk konservasi berbasis desa.
- Perlu pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable tourism & livelihood).

A.6 Potensi Kawasan Tertinggal yang Bisa Diintervensi

Nusa Penida termasuk wilayah yang masih terindikasi sebagai daerah tertinggal relatif di Bali: Akses layanan air bersih masih rendah (<55% rumah tangga). Beberapa desa belum terjangkau listrik 24 jam. Jarak tempuh dan biaya logistik tinggi.

Pokok-pokok penting:

- Butuh kebijakan afirmatif melalui RPJMD agar wilayah kepulauan tidak tertinggal.
- Desa-desa di Nusa Penida dapat menjadi prioritas pembangunan lintas sektor.

B. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung

Dalam merancang arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Klungkung 2025–2029, penting untuk memahami secara mendalam permasalahan aktual dan

struktural yang dihadapi masyarakat dan wilayah. Permasalahan pembangunan Klungkung mencakup aspek sosial, ekonomi, spasial, kelembagaan, hingga lingkungan hidup. Berikut uraian lengkapnya, disertai data dan pokok-pokok identifikasi permasalahan:

B.1. Kesenjangan Antarwilayah (Daratan–Kepulauan)

Kabupaten Klungkung terdiri dari dua entitas wilayah yang berbeda karakter: wilayah daratan (Klungkung, Dawan, Banjarangkan) dan wilayah kepulauan (Nusa Penida). Ketimpangan pembangunan antarwilayah ini ditandai dengan: Ketimpangan akses infrastruktur dasar, terutama jalan, air bersih, sanitasi, dan dermaga penyeberangan. Distribusi layanan publik tidak merata: rasio guru dan tenaga medis di Nusa Penida masih di bawah standar nasional (1 guru/28 siswa vs standar 1/20; data Dinas Pendidikan Klungkung, 2023). Distribusi anggaran pembangunan lebih terkonsentrasi di wilayah daratan.

Pokok masalah: Ketimpangan spasial dan pelayanan antarwilayah, dan keterisolasian geografis menyebabkan akses pembangunan lebih lambat di kepulauan.

B.2. Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Ekonomi

Meski tren kemiskinan menurun, namun Klungkung masih menghadapi tantangan kemiskinan struktural: Tingkat kemiskinan per Maret 2023 sebesar 5,27% (sekitar 10.220 jiwa); masih lebih tinggi dari rata-rata provinsi Bali (4,25%) — Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mencapai 0,58, menandakan jurang perbedaan antara rata-rata pengeluaran dan garis kemiskinan masih lebar. Desa-desa di Nusa Penida dan wilayah pegunungan Dawan menjadi kantong kemiskinan, terutama petani lahan kering, nelayan kecil, dan buruh informal.

Pokok masalah: Ketimpangan distribusi kesejahteraan, dan masih banyak warga hidup dalam keterbatasan akses dan daya beli rendah.

B.3. Ketergantungan terhadap Pariwisata dan Kerentanan Ekonomi

Perekonomian Klungkung sangat bergantung pada sektor pariwisata, yang meskipun tumbuh pesat, juga menyimpan kerentanan tinggi: Kontribusi sektor akomodasi & makanan-minuman mencapai 24,91% terhadap PDRB (BPS Klungkung, 2023). Fluktuasi kunjungan wisatawan sangat berpengaruh terhadap sektor riil, terutama UMKM dan pekerja informal. Pandemi COVID-19 (2020–2021) memperlihatkan ketahanan ekonomi yang lemah akibat ketergantungan tunggal pada sektor pariwisata.

Pokok masalah: Diversifikasi ekonomi belum optimal. Ketahanan ekonomi masyarakat sangat rentan terhadap krisis global.

B.4. Keterbatasan Layanan Publik Dasar

Layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi masih belum menjangkau seluruh masyarakat secara adil dan setara: Air bersih: kurang dari 55% rumah tangga di Nusa Penida memiliki akses air bersih layak (Bappeda Litbang Klungkung, 2023). Sanitasi: 29% rumah tangga di wilayah kepulauan belum memiliki akses jamban sehat. Kesehatan: jarak ke Puskesmas/Pustu di beberapa dusun mencapai >5 km dan waktu tempuh >1 jam. Pendidikan: sekolah dasar dan SMP di wilayah kepulauan banyak yang kekurangan guru tetap.

Pokok masalah: Ketimpangan layanan dasar, dan akses publik terhadap hak dasar belum terpenuhi secara merata.

B.5. Kerusakan Lingkungan dan Ancaman Iklim

Wilayah pesisir dan kepulauan Klungkung menghadapi tekanan lingkungan yang cukup tinggi: Abrasi pantai dan degradasi terumbu karang akibat pembangunan pariwisata tak terkendali. Kekeringan tahunan di musim kemarau di Nusa Penida menjadi masalah kronis. Sampah wisata: lebih dari 10 ton per hari sampah plastik dihasilkan di kawasan pariwisata Nusa Penida (DLH, 2023). Perubahan iklim: berdampak pada musim tanam, pasokan air, dan produktivitas nelayan.

Pokok masalah: Ketahanan lingkungan rendah dan belum ada sistem pengelolaan sumber daya dan risiko bencana yang memadai di tingkat desa.

B.6. Lemahnya Integrasi dan Koordinasi

Perencanaan Perencanaan pembangunan saat ini masih menghadapi beberapa tantangan kelembagaan: Dokumen RPJMD–Renstra OPD–RKPD–KUA-PPAS belum sepenuhnya sinergis. Forum perencanaan (musrenbang) belum efektif menjembatani usulan warga desa ke program strategis kabupaten. Partisipasi desa adat dan masyarakat lokal masih bersifat administratif, belum menyentuh ruang substantif kebijakan.

okok masalah: Fragmentasi perencanaan dan pelaksanaan antar-OPD. Minimnya partisipasi bermakna dari masyarakat desa dan pemangku adat.

B.7. Kelembagaan Desa Belum Berdaya Penuh

Desa memiliki peran sentral dalam pembangunan, namun secara kelembagaan masih menghadapi hambatan: Kapabilitas SDM aparatur desa masih rendah dalam aspek perencanaan, pelaporan, dan manajemen keuangan. Koordinasi antara desa dinas dan desa adat masih sering tumpang tindih. Peran BUMDes dalam menggerakkan ekonomi desa belum optimal.

Pokok masalah: Keterbatasan kapasitas kelembagaan desa. Perlu peningkatan kualitas tata kelola dan sinergi kelembagaan lokal.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui RPJMD 2025–2029 diarahkan untuk menjalankan sejumlah program prioritas yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Program-program ini disusun dengan pendekatan tematik-spasial dan berbasis kearifan lokal, untuk memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan bersifat kontekstual, adil, dan menyentuh akar permasalahan pembangunan desa.

C.1 Bidang Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Bidang infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Klungkung menghadapi tantangan unik berupa ketimpangan antara wilayah daratan (Banjarangkan, Klungkung, Dawan) dan kepulauan (Nusa Penida). Rendahnya akses jalan mantap, keterbatasan air bersih, dan konektivitas antarwilayah menjadi persoalan mendasar. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menjawab kebutuhan konektivitas, pemerataan pelayanan dasar, dan pengurangan isolasi wilayah kepulauan.

Program dan Kegiatan:

- Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antar desa.

- Revitalisasi dermaga rakyat di Nusa Penida dan Lembongan.
- Pengadaan dan distribusi sistem air bersih (sumur bor, tandon gravitasi).
- Perluasan jaringan listrik dan eliminasi wilayah blank spot telekomunikasi.
- Pengembangan sistem transportasi antarpulau rakyat (subsidi kapal kecil).
- Penataan drainase lingkungan desa untuk mencegah genangan dan banjir lokal.

C.2 Bidang Ekonomi Lokal dan Kemandirian Desa

Ekonomi Klungkung ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Namun banyak desa masih bergantung pada sektor informal dan belum memiliki kelembagaan ekonomi desa yang kuat. Untuk mewujudkan desa yang mandiri dan produktif, perlu penguatan BUMDes, peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, dan penciptaan ekosistem wirausaha yang berkelanjutan.

Program dan Kegiatan:

- Pelatihan manajemen usaha dan keuangan untuk pengurus BUMDes.
- Penguatan unit usaha BUMDes berbasis potensi lokal (rumput laut, pertanian organik, dll).
- Pembentukan inkubator wirausaha desa untuk pemuda dan perempuan.
- Pengembangan pasar desa dan integrasi ke e-katalog lokal.
- Festival tahunan produk unggulan desa di tingkat kabupaten.
- Fasilitasi kemitraan antara BUMDes dengan sektor swasta atau koperasi.

C.3 Bidang Pariwisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif

Klungkung memiliki keunggulan dalam sektor pariwisata budaya dan alam. Lukisan Kamasan, seni pertunjukan, serta bentang alam Nusa Penida adalah potensi yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi desa. Pendekatan yang diperlukan adalah pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama, serta pelestarian budaya sebagai kekuatan identitas lokal.

Program dan Kegiatan:

1. Pengembangan desa wisata mandiri berbasis budaya dan ekologi. Pelatihan SDM pariwisata desa (homestay, pemandu lokal, kuliner lokal).
2. Pemetaan dan penataan Daya Tarik Wisata (DTW) berbasis komunitas.
3. Fasilitasi pendaftaran seni-budaya sebagai kekayaan intelektual komunal.
4. Penyelenggaraan festival budaya rakyat dan pertunjukan keliling desa.
5. Pendampingan pelaku ekonomi kreatif (branding, kemasan, pemasaran digital).

C.4 Bidang Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan

Peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi agenda utama. Masih terdapat tantangan berupa stunting, keterbatasan akses layanan kesehatan di pulau-pulau kecil, serta kebutuhan akan dukungan pendidikan bagi kelompok rentan. Intervensi afirmatif perlu difokuskan pada wilayah 3T (tertinggal, terpencil, terluar).

Program dan Kegiatan:

- Pengoperasian Puskesmas keliling dan penyediaan tenaga medis di desa terpencil.
- Penyediaan rumah singgah dan beasiswa bagi pelajar dari Nusa Penida.
- Program sanitasi lingkungan dan SPAL berbasis masyarakat.
- Pemberdayaan keluarga rawan stunting melalui pendampingan gizi. Layanan desa inklusif bagi penyandang

disabilitas dan lanjut usia.
- Penyediaan sarana bermain dan taman edukasi untuk anak-anak desa.

C.5 Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim

Kabupaten Klungkung menghadapi tantangan lingkungan seperti abrasi pantai, krisis air bersih, sampah wisata, dan bencana iklim. Perlindungan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan dengan pendekatan partisipatif berbasis desa.

Program dan Kegiatan:

1. Rehabilitasi hutan desa dan sempadan pantai/sungai.
2. Pembangunan sumur resapan dan embung desa di wilayah rawan kekeringan.
3. Pembentukan bank sampah desa dan unit pengelolaan sampah terpadu (TPS 3R).
4. Pelatihan relawan desa siaga bencana (tsunami, longsor, kekeringan). Simulasi evakuasi dan penyusunan rencana kontinjensi bencana.
5. Edukasi lingkungan untuk sekolah dan kelompok pemuda desa.

C.6 Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat

Pemerintahan desa yang kuat dan partisipatif adalah kunci sukses pembangunan. Masih dijumpai tantangan seperti lemahnya perencanaan desa, rendahnya akuntabilitas keuangan, serta belum terbangunnya kolaborasi optimal antara desa dinas dan desa adat.

Program dan Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Sekolah Pemerintahan Desa (SPeDesa) untuk aparatur dan BPD.
2. Penyusunan dan pendampingan dokumen RPJMDes dan APBDes berkualitas.
3. Revitalisasi forum rembuk desa dan musrenbang tematik.
4. Penyusunan SOP koordinasi desa dinas – desa adat.
5. Penguatan kapasitas tim monitoring pembangunan desa berbasis masyarakat.
6. Digitalisasi proses perencanaan, pelaporan dan pengawasan pembangunan desa.

III. Rekomendasi

Untuk mengaktualisasikan gagasan penyusunan RPJMD Kabupaten Klungkung yang berbasis kearifan lokal dan berpijak dari desa, maka berikut ini adalah beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh BRIDA dan Pemerintah Kabupaten Klungkung:

1. Mengarusutamakan Perspektif Desa dalam Proses Penyusunan RPJMD

Seluruh tahapan penyusunan RPJMD—mulai dari perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, hingga indikator kinerja—perlu mengintegrasikan perspektif dan kebutuhan nyata desa. Ini dapat dilakukan melalui:

- Optimalisasi Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan sebagai sumber data utama isu pembangunan.
- Pemanfaatan dokumen RPJMDes sebagai bottom-up input untuk sinkronisasi arah

pembangunan kabupaten.

2. Menetapkan “Penguatan Kemandirian Desa” sebagai Prioritas Tematik RPJMD

Tema pembangunan jangka menengah perlu memposisikan desa sebagai pelaku utama pembangunan. Untuk itu, disarankan agar:

- Prioritas daerah mencantumkan eksplisit pengembangan BUMDes, desa wisata, dan desa tangguh iklim.
- Indikator kinerja utama daerah (IKU) mencakup indikator kemandirian desa, PADes, dan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

3. Menyiapkan Sistem Informasi Terpadu untuk Data Pembangunan Desa

Diperlukan integrasi sistem data perencanaan dan penganggaran desa–kabupaten agar proses perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning). Sistem ini dapat menggabungkan data RPJMDes, profil desa, realisasi APBDes, dan capaian SDGs Desa. BRIDA dan DPMD dapat menginisiasi dashboard monitoring berbasis spasial.

4. Melakukan Pendekatan Kultural dalam Perumusan Kebijakan

Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, pararem adat, subak, dan kearifan pengelolaan sumber daya perlu menjadi basis filosofi dan operasional kebijakan publik. Perlu disusun panduan kebijakan berbasis kearifan lokal (local wisdom-based policy brief). Kegiatan partisipatif seperti “Rembuk Gagasan Pembangunan Desa” dan “Temu Adat Pembangunan” dapat menjadi ruang penguatan pendekatan ini.

5. Menguatkan Sinergi OPD dan Pemerintahan Desa

Seluruh program pembangunan desa tidak dapat berjalan sendiri. Maka perlu dibangun: Forum koordinasi tematik antar-OPD dengan pemerintah desa (misal: forum ekonomi desa, forum ketahanan iklim desa). Penyelarasan nomenklatur program kegiatan OPD dan program prioritas desa.

6. Mereformulasi Skema Dana dan Insentif Berbasis Kinerja Desa

Untuk mendorong inovasi dan akselerasi pencapaian pembangunan desa, Pemkab Klungkung disarankan mengembangkan: Skema insentif desa berprestasi berbasis kinerja pencapaian SDGs Desa, penyerapan anggaran, dan capaian program prioritas kabupaten. Dana inovasi desa berbasis proposal tematik pembangunan (misalnya untuk desa hijau, desa literasi, desa budaya).

7. Mengembangkan RPJMD sebagai Dokumen Hidup dan Berbasis Partisipasi

RPJMD sebaiknya tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi dokumen hidup yang mampu: Digunakan sebagai acuan lintas pemangku kepentingan: masyarakat, akademisi, swasta, hingga desa adat. Dibuat dalam versi naratif populer, infografis, dan disosialisasikan hingga ke level desa.

Semarapura, 12 Juni 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

No.	Nama Kegiatan	Hari/Tgl	Lokasi Kegiatan	Materi Kegiatan	Isi Bahasan	Simpulan dan Saran
1.	Sosialisasi	Kamis/15 Mei 2025	Praja Mandala Kabupaten Klungkung	Rencana Penataan Pantai Nusa Penida dan Nusa Lembongan	• Analisis perubahan Garis pantai: Pemodelan dari citra satelit dan moadel matematik) • Rancangan Desain Penanganan • Tim Koordinasi Manajemn Pengelolaan Pantai	• Pastikan TKMPP memiliki struktur kerja formal, SOP yang jelas, dan platform koordinasi yang rutin melibatkan stakeholder kunci (pemerintah, BWS, desa, pelaku usaha, akademisi). • Berikan pelatihan teknis, pelibatan dalam monitoring community-based, dan edukasi ekowisata untuk menjaga kelestarian pantai.
2.	Rapat Tim Kelitbangan	Jumat/16 Mei 2025	BRIDA	Rekomendasi Kajian Tipping Fee Pengolahan sampah	Perumusan kajian Tipping Fee Pengolahan sampah di TOSS Center oleh Penyedia dalam skema KPBU	• Penyedia harus menyaiakan pra Studi kelayakan, terkaitkan kelayakan teknis peralatan/sistem, kelayakan bisnis, dan finansial, serta lingkungan • BRIDA akan memberikan tellah lebih lanjut atas dokumen Pra-FS

V. Lampiran

-